

DAFTAR PUSTAKA

- Buku

- Ali, Achmad. 2013. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Alrasid, Harun. 2010. Pengisian Jabatan Presiden, Jakarta:PT.Pustaka Utama Grafiti
- Ali, Zainuddin.2013 Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, Zainal dan Yasin, Rahman. 2015. Pilkada Langsung, Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)
- Arinanto, Satya. 1993. Pembangunan Hukum dan Demokrasi , Jakarta: Dayamedia utama
- Assidiqie, Assidiqie.2010. Model-Model Peradilan Konstitusi di Berbagai Negara, Jakarta : Sinar Grafika
- Assidiqie, Jimly. 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Konstitusi Press
- Assidiqie, Jimly. 2009. Menuju Negara hukum Yang Demokrtais, Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer
- _____, 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Jakarta : BIP, Gramedia
- _____. Oktober 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta : Konstitusi Press.
- _____. 2005. Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____ 2002. Dalam Sri Edi Swasono (Ed), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Yayasan Bung Hatta
- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, Jakarta: UI-Press
- Basah, Sjachan. 1981. Hukum Tata Negara Indonesia,Bandung: Penerbit Alumni, Cet.ke-3.
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bryan A.Garner,1999.editor, Black's Law Dictionary, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group

- Chaidir, Ellydar. 2001, Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden, Prespektif Konstitusi, Yogyakarta : UII-Press
- E.Ultech, 1960. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Penerbit FHPM Unpad
- Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: PT. Alumni
- Fauzan, Uzair dan Heru Parsetyo. 2006. Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Friedman, Lawrence M. 2015. Sistem Hukum; Persepektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem; A Social Science Perspective), di terjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan VII, Bandung: Nusa Media
- _____. 1993. Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory, penerjemah: Mohammad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 1993. Teori dan Filsafat (Legal Theory). Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin. Susunan II. Cetakan II, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- _____. 1984. Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall. Inc
- _____. 1984. “ America Law”, (London: W.W, Norton & Company)
- Friedman, W. Teori dan Filsafat (Legal Theory). Diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Susunan II. Cetakan II, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada 1993
- Fahrudin, Achmad, 2013, Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014: Mengawasi Pemilu Memperkuat Demokrasi, Jakarta : Gramedia Utama Publishindo
- Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2014. Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka (Edisi Revisi)
- Harahap Zairin. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi), Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Hatta, Mohammad. 2009. *Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung : Segi Arsi, 2009
- Hobbes, Thomas. (1588-1679)
- Hoesein, Zainal Arifin dan Yasin, Rahman. 2015. *Pilkada Langsung*, Jakarta Timur: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB)
- Hutauruk, Muhamad. 1978. *Asas-Asas Ilmu Negara*, Jakarta: Erlangga, Cetakan Kedua
- International IDEA, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*, 2010, Swedia: Stockhoim,
- IFES. 2011. *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (Terjemahan)*, Washington D.C.
- Indrati, M.F.S.2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Kanisius.Yogyakarta
- Kelsen, Hans. 2014. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cet. IX, Bandung: Nusa Media
- Kuncoro, Brama.2010. *Tesisi Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Talak Di Pengadilan Agama Magelang*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Librayanto, Romi. 2009, *Trias Politica”Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”* Makasar: Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial (PuKAP)
- Logman, JHA. 2014. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*. Edisi Terjemahan, Jakarta: Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve
- Mahfud MD, 2005. *Pendekatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES
- Manan, Bagir. 2000. *Teori dan Politik Onstitusi*, Jakarta : Dirjen Dikti Depdiknas
- _____. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mawardi, Irvan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Merokusumo, Sudikno, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- _____, Sudikno, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet 2, Yogyakarta: Liberty, hal.3

- _____, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet 1, Yogyakarta: Liberty.
- M, Gaffar, Janedri, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konpress
- _____. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta : Konstitusi Press Konpress
- ND Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penilaian Hukum Normatif dan Hukum Emperis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurtjahjo, Hendra. 2006. Fissafat Demokrasi, Jakarta : Bumi Aksara
- Philips Nonet and Philips Selznik, Law and Society in Transtitation Toward Responsive Law Transaction Publisher, 2001, Diktat Politik Hukum yang dikumpulkan oleh Prop. Satya Arinanto, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Purbopranoto, Kuntjoro. 1975. Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrsi, Bandung: Eresco
- Rahardjo, Satjipto, 2010, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Penerbit: Buku Kompas
- _____, 2006 membedakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas
- Rahardjo, Satjipto. 1983, Masalah-Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru,
- Rasyidin, Utang dan Supriyadi, Dedi. 2014. Pengantar Hukum Indonesia (Dari Tradisi ke Konstitusi), Bandung: CV. Pustaka Setia
- Rawls, John. 2011. Teoro keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, terjemahan A Theory of Justice, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ruslan, Achmad, 2011, Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Santoso, Topo, dkk, 2014, Penegakan Hukum Pemilu: Praktek Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Sardini, Nur Hidayat. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta: LP2AB
- Shidarta dan Myrna A. Safitri, 2012, Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi, Jakarta: Epistema Institute

- Singodimerdjo, Kasman. 2008. Masalah Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Bulan Bintang
- Sodikin. 2014. Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Bekasi : Gramata Publishing
- Soehino, 2001. Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- _____, dan Sri Marmuji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- _____. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Subakti, Ramlan, dkk. 2011. Penanganan Pelanggaran Pemilu, Jakarta : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- Sumali, 2002, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), UMM Press, Malang.
- Sunaryo, Sidik. 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana; Malang: UMM Press.
- Suny, Ismail. 1984. Mekanisme, Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru
- Suratman dan Dillah, Philips. 2014. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Bandung: Alfabeta
- Syarif, Amiroeddin. 1987. Perundang-Undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya), Jakarta: PT. Bina Aksara
- Thaib, Dahlan. Konsepsi
- The Liang Gie, 1982. Problematika & Teori Keadilan (Teori-Teori Keadilan) Yogyakarta: , penerbit Supersukses:
- Unger, Roberto. 1976. Law in Modern Society, New York: The Free Press
- Yanto, Nur. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Teori dan Prakteknya di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia), Jakarta: Mitra Wacana Media
- Yuslim. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Sinar Grafika
- Widodo, Heru. 2015. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika

- **Riset, Skripsi atau Tesis**

Ensiklopedia Indonesia N.V.W. Van Hoeve, dalam Donna Okthalia Setia Beudi, 2010, “Disertasi: Hakikat, Parameter, dan Peran Nilai Lokal Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Perundang-Undangan yang Baik, Makasar: “Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Manan, Bagir. 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, Bandung: Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung

Kuncoro, Brama. 2010. Tesis Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Talak Di Pengadilan Agama Magelang, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pramono Sukalegowo. 1983, Tesis Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Rajab, Achmadudin. 2013. Tinjauan Yuridis Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu Dalam Pemilukada, Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia

Heriyanto, 2015. Tinjauan Analisis Putusan Peradilan Terhadap Ketaatan Komisi Pemilihan Umum. Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Indonesia

- **Perundang-Undangan dan Keputusan Pengadilan**

Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Mahkamah Konstitusi. 2014. Keputusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang Permohonan Uji Materil UU No.42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terhadap UUD RI 1945

Mahkamah Konstitusi. 2014. Keputusan MK No. 97/PUU-XI/2013 Tentang Permohonan Uji materil UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan daerah terhadap UUD 1945

- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintanu, 21 Desember 2015, hal 167.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 5 Tahun 2015 Perubahan atas Putusan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Republik Indonesia, 2016. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Yogyakarta : Gradien Mediatama
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Republik Indonesai. 2015. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Republik Indonesia. 2014. UUD 1945 dan Amandemennya, Yogyakarta: Second Hope Perpustakaan Nasional
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: PT. Fokus Media
- Republik Indonesai. 2010. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: PT. Fokus Media
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: PT. Fokus Media
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bandung: PT. Fokus Media

Republik Indonesia, 2006, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Bandung : PT. Fokus Media

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Cet ke-VII tahun 2015, Bandung: Citra Umbara Bandung

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta :Balai Pustaka

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Bandung: Fokusmedia

KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, Surat Pengumuman No. 65/KPU/002.434857/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hasundutan Tahun 2015.

- **Internet**

www.hukum.com.strategi-penyelesaian-perkara-dengansederhana-cepat-biaya-ringan/pengadilan-khusus-pemilu-tidak-eliminir-per

www.republika.co.id. Jimly Assidique, Ketua DKPP dalam Sambutan pada Seminar DKPP Outlook 2016 di Jakarta, Senin (28/12/2015).

www.hukum.com. Pengadilan Khusus Pemilu Tidak Hilangkan Peran MK “Diskusi Terbatas Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)” di Jakarta, Rabu, 21/7/2010

www.MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatra Utara tanggal 19 Pebruari 2016

www.MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Rokan Hulu Prop. Riau tanggal 19 Pebruari 2016

www.MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Pelalawan Prov.Riau tanggal 18 Pebruari 2016

www.MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Muna Prov. Riau tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kab. Teluk Bintuni Papua Barat tanggal 7 Juni 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tentang PHP Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 26 Januari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Boven Digoel Papua tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Gresik Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Simalungun tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 19 Pebruari 2016

www..MahkamahKonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 PHP Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 8 Agustus 2016

- **Makalah dan Majalah**

Asshiddiqie, Jimly, 2015, “Liberalisasi Sistem Pengisian Jabatan Publik”, Disampaikan dalam rangka Konferensi Hukum Tata Negara ke-2, Padang: UNAND,

Fandytiawan. 2004. Elektabilitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Hukum Pidana

Mahfud MD, 2009, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai Hanura, Jakarta, 8 Januari

Pujirahayu, Esmi Warasih. 2001. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan”, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001).

Harian Kompas, Sengketa Pemilu, Senin 23 Mei 2015. “ Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun dalam Sidang Promosi Doktor di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang”. Hal. 2

Ramlan Surbakti, 2016, Penegakan Hukum dan Pilkada, Kompas Opini, Selasa, 8/3/2016

Zulpa, Hamdan, sebagai pembicara utama dalam “Workshop Manajemen Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017”, di Hotel Alia, Jakarta Pusat, Tanggal 25 Februari 2016.

Nurdin, Ali S.H, S.T. sebagai pembicara dalam “Workshop Manajemen Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017”, di Hotel Alia, Jakarta Pusat, Tanggal 25 Februari 2016.